

**ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN  
PENCAPAIAN OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI KOTA BANDAR  
LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

Pasha Az-Zikri Yulian

NPP. 31.0324

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email : 31.0324@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Riswati, S.Pd, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP) :** *The Local Government Financial Statements (LKPD) serve as an annual routine task for the local governments to report on their financial status. The Bandar Lampung City Government received a Qualified Opinion (WDP) for the years 2020-2022. This situation prompted the need for research. Purpose :* *This research aims to assess the quality of financial statements in efforts to improve the achievement of the Audit Board of Indonesia's (BPK) opinions for Bandar Lampung City Government. It also seeks to identify both internal and external supporting and inhibiting factors, and the measures taken to address these inhibiting factors, either directly or indirectly. Method :* *The research was conducted at BPKAD Bandar Lampung City using qualitative research methods. The data utilized includes both primary and secondary data obtained through interviews, observations, and documentation techniques. Result :* *The results indicated that the financial statements of Bandar Lampung City comply with existing policies and regulations. Supporting factors include having competent human resources at BPKAD, while inhibiting factors involve the collection of reports from the agencies and departments of Bandar Lampung City Government nearing deadlines. Measures taken include coordinating meetings for the preparation of financial statements and proposing the recruitment of human resources with financial competence for BPKAD. Conclusion :* *Based on the research and analysis regarding the quality of financial statements in efforts to improve the Audit Board of Indonesia's opinions for Bandar Lampung City, it can be concluded that the preparation of financial statements has been well-planned, with optimized potential assets and neutrality in reporting. Despite challenges such as limited human resources and delays in report submission from relevant departments and agencies, the measures to overcome these obstacles include internal and external meetings, preparation of financial statement guidelines, and ongoing project monitoring.*

**Keywords :** *BPK, Bandar Lampung, Financial Statements, Opinion*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) sebagai pekerjaan rutin tahunan bagi Pemerintah Daerah dalam melaporkan terkait keuangan di Pemerintah Daerahnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2020-2022. Kondisi tersebut menarik untuk dilakukan penelitian. **Tujuan :** Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dalam upaya peningkatan pencapaian opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat baik internal ataupun eksternal serta upaya mengatasi faktor penghambat baik secara langsung ataupun tidak langsung. **Metode :** Penelitian dilakukan di BPKAD Kota Bandar Lampung dengan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan data yang didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian didapatkan bahwa laporan keuangan di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Faktor pendukung yaitu SDM dengan kompetensi yang sesuai di BPKAD sedangkan faktor penghambat yaitu pengumpulan laporan dari Badan dan Dinas di Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mendekati Batas Waktu. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan dan saran yang ada diberikan dengan mengajukan permohonan pengadaan SDM dengan kompetensi keuangan untuk BPKAD. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait kualitas laporan keuangan dalam upaya peningkatan pencapaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah terencana dengan baik, dengan optimalisasi potensi aset daerah dan netralitas dalam penyusunan laporan, meskipun terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan SDM dan keterlambatan pengumpulan laporan dari dinas dan badan terkait. Upaya mengatasi hambatan tersebut meliputi rapat internal dan eksternal, penyusunan panduan laporan keuangan, serta pemantauan proyek yang sedang berlangsung.

**Kata Kunci :** BPK, Bandar Lampung, Laporan, Keuangan dan Opini,

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pekerjaan rutin tahunan yang dilakukan untuk pengujian dan analisis lebih lanjut. LKPD sebagai hasil dari manajemen merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan baik dari sumber maupun penggunaannya dalam menjalankan suatu organisasi (Tegor et al., 2021, p. 15). Laporan keuangan disusun secara terstruktur untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Fungsi utama laporan keuangan adalah untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, yakni menyediakan informasi terkait kondisi keuangan organisasi secara keseluruhan (Tegor et al., 2021, p. 16).



Laporan keuangan juga berfungsi sebagai bukti tanggung jawab dalam penggunaan keuangan oleh organisasi, termasuk pemerintah. Pemerintah, sebagai entitas pelapor, wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik (Maydiyanti et al., 2020, p. 70). Laporan keuangan penting untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan, yang menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk membuat kebijakan publik (Padang, 2022, p. 3). Selain itu, laporan keuangan juga digunakan untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan serta menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik.

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan informasi terkait kondisi keuangan, alokasi sumber daya, dan hasil kegiatan yang telah dicapai. Komponen utama laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Padang, 2022, p. 14). Setiap komponen memiliki fungsi spesifik, seperti Neraca yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas, dan LAK yang menggambarkan mutasi kas berdasarkan aktivitas operasional pemerintah daerah (Padang, 2022, p. 15). CaLK memberikan penjelasan naratif dan rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan (Puspa & Prasetyo, 2020, p. 283).

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, setiap tahunnya wajib menyusun laporan keuangan yang kemudian diaudit dan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Maydiyanti et al., 2020, p. 71). Opini audit adalah evaluasi sistematis yang dilakukan oleh BPK untuk menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap kriteria yang ditetapkan (Padang, 2022, p. 23). Opini audit terdiri dari lima macam: Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf Penjelasan, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Yunawati, 2022, p. 5). Opini ini penting untuk mengetahui pencapaian kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan (Panggabean, 2019, p. 152).

Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) diberikan ketika auditor menemukan bukti yang cukup bahwa terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, baik secara agregat maupun individual, yang tidak pervasif namun material (Sasmita, 2022, p. 104). Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan opini WDP dari BPK selama periode 2020-2022. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan upaya yang dilakukan untuk memperbaikinya (Panggabean, 2019, p. 152). Kesalahan pervasif adalah kesalahan yang berdampak domino pada kondisi lainnya, sehingga perlu ada langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini (Anwar & Amin, 2020, p. 223).

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung. Sejak 2019 hingga 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), meskipun terdapat peningkatan dalam realisasi pendapatan dan penurunan utang belanja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini BPK serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas laporannya agar dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi opini BPK adalah rasionalitas antara pendapatan dan utang belanja. Berdasarkan data yang ada, terdapat peningkatan pendapatan dari Rp. 627 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 645 miliar pada tahun 2022, dan penurunan utang belanja dari Rp. 412 miliar menjadi Rp. 357 miliar pada periode yang sama. Namun, opini WDP tetap diberikan oleh BPK, yang menunjukkan bahwa masih ada kelemahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tersebut dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperbaikinya.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) Nomor 2, yang mencakup relevansi, keandalan, daya banding, dan konsistensi. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana LKPD Kota Bandar Lampung memenuhi standar-standar tersebut dan bagaimana hal ini mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK. Penelitian sebelumnya (Fazlurahman et al., 2020) menunjukkan bahwa opini audit sangat dipengaruhi oleh kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga penting untuk melihat apakah Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mematuhi standar-standar ini.

Penelitian ini juga akan mengisi gap penelitian terkait dengan analisis mendalam tentang penyebab spesifik opini WDP pada LKPD Kota Bandar Lampung. Meskipun terdapat beberapa studi yang membahas tentang opini audit BPK, penelitian yang mengaitkan opini tersebut dengan karakteristik kualitas laporan keuangan SFAC masih terbatas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur akuntansi pemerintahan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit BPK dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai opini WTP.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

- 1) **Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Opini BPK di Kabupaten Banyumas** Penelitian ini mengevaluasi hubungan antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini yang diberikan oleh BPK. Studi ini menemukan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik, ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap standar akuntansi dan transparansi informasi, berkontribusi signifikan terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan penilaian positif dari BPK (Setiawan & Dewi, 2020).
- 2) **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara** Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah, termasuk kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya berdampak pada opini BPK yang diterima (Simanjuntak, 2019).
- 3) **Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung** Penelitian ini menganalisis bagaimana sistem pengendalian intern berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung. Ditemukan bahwa implementasi pengendalian intern yang efektif mampu meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan, yang merupakan faktor penting dalam penilaian BPK (Sari, 2021).



- 4) **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah** Studi ini mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang optimal dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi laporan keuangan, yang berdampak positif pada opini BPK (Nugroho, 2018).
- 5) **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** Penelitian ini meneliti penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Ditemukan bahwa kepatuhan terhadap SAP secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang diukur melalui tingkat keandalan dan relevansi informasi, serta berdampak pada opini BPK yang lebih baik (Putri, 2020).
- 6) **Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo** Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan pengawasan internal yang baik secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kedua faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, yang menjadi penentu dalam perolehan opini WTP dari BPK (Yuliani & Prabowo, 2021).
- 7) **Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur** Studi ini mengkaji pengaruh good governance terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempengaruhi opini BPK (Wahyuni, 2019).
- 8) **Analisis Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Medan** Penelitian ini menemukan bahwa peran auditor internal sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Auditor internal yang kompeten dan independen mampu melakukan pengawasan dan pengecekan yang efektif, sehingga meningkatkan akurasi dan integritas laporan keuangan, yang berdampak pada opini BPK (Hutagalung, 2020).
- 9) **Pengaruh Pelatihan dan Pendidikan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat** Studi ini mengevaluasi pengaruh pelatihan dan pendidikan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi akuntansi melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempengaruhi opini BPK (Fauzi, 2021).
- 10) **Evaluasi Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Surabaya** Penelitian ini meneliti pengaruh implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Ditemukan bahwa implementasi sistem akrual mampu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi keuangan, yang secara positif mempengaruhi opini BPK (Santoso, 2018).

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian dengan judul "Analisis Kualitas Laporan Keuangan dalam Upaya Peningkatan Pencapaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung" menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dengan mengintegrasikan analisis karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) Nomor 2 ke dalam konteks pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbeda

dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada analisis deskriptif atau evaluasi umum terhadap opini audit, penelitian ini secara khusus menyoroti relevansi, keandalan, daya banding, dan konsistensi laporan keuangan sebagai faktor penentu utama dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi lebih mendalam terhadap aspek-aspek spesifik yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas laporannya.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan menyajikan analisis longitudinal terhadap perubahan dan perkembangan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2022, periode di mana opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) konsisten diberikan oleh BPK. Dengan mengevaluasi data kuantitatif mengenai penganggaran, realisasi pendapatan, dan utang belanja serta data kualitatif mengenai kebijakan dan upaya perbaikan yang telah dilakukan, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan mengenai determinan opini audit BPK tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang berbasis bukti untuk pemerintah daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Pendekatan holistik dan integratif ini menjadikan penelitian ini sebagai salah satu yang pertama di bidangnya yang menawarkan peta jalan yang jelas menuju peningkatan pencapaian opini audit yang lebih baik.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung serta untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporannya. Dengan menganalisis karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang masih diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, meskipun terdapat upaya perbaikan dari tahun ke tahun.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pemerintah daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam memperoleh opini audit yang lebih positif. Dengan mengidentifikasi gap-ga terkait dalam kualitas laporan keuangan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan praktik akuntansi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia, khususnya dalam konteks evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

## **II. METODE**

Untuk penelitian yang dilakukan di BPKAD Kota Bandar Lampung dengan pendekatan metodologi kualitatif, peneliti menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan wawancara langsung dengan responden yang terlibat langsung dalam proses keuangan dan administrasi di BPKAD. Wawancara ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik-praktik internal, tantangan yang dihadapi, dan persepsi mereka terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari dokumentasi internal BPKAD, termasuk laporan keuangan tahunan, kebijakan internal, dan dokumentasi terkait lainnya yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

Metode observasi juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung proses-proses administratif dan keuangan di BPKAD. Observasi ini membantu peneliti untuk



memahami secara lebih mendalam bagaimana kebijakan dan prosedur yang ada di BPKAD diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Hal ini memberikan perspektif tambahan yang diperlukan untuk memvalidasi dan menginterpretasikan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek operasional dan administratif BPKAD. Analisis kualitatif mendalam dari data yang terkumpul mengungkapkan pola-pola, temuan-temuan, dan implikasi dari kebijakan yang ada terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman terhadap dinamika organisasi BPKAD Kota Bandar Lampung, termasuk identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keseluruhan BPKAD dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penekanan pada metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan untuk mendalami pandangan, persepsi, dan pengalaman langsung dari para aktor kunci dalam BPKAD, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika organisasi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan empiris, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan teori dan praktik administrasi publik di tingkat lokal.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisis Kualitas Laporan Keuangan dalam upaya peningkatan pencapaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan Di Kota Bandar Lampung**

Dalam penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan informasi tentang proses penyusunan laporan keuangan dan perencanaan keuangan di Kota Bandar Lampung.

Proses penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kota Bandar Lampung sangat ditekankan pada aspek relevansi dan ketepatan waktu. Informasi keuangan yang disajikan harus mampu memberikan perbedaan dalam pengambilan keputusan dengan membantu para pengguna laporan keuangan untuk memprediksi peristiwa di masa depan, mengelola situasi saat ini, serta mengevaluasi kejadian masa lalu. Hal ini terbukti dari keterlibatan aktif dalam rapat koordinasi untuk menetapkan timeline dan prosedur yang memastikan laporan keuangan tersedia tepat waktu sebelum kehilangan relevansinya.

Selain relevansi dan ketepatan waktu, laporan keuangan juga harus memiliki nilai prediktif. Ini mengacu pada kemampuan informasi keuangan untuk memprediksi arus kas dan kondisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk memperkuat kestabilan

keuangan, menunjukkan pentingnya laporan keuangan dalam membantu perumusan keputusan yang berkelanjutan.

Nilai umpan balik dari laporan keuangan juga menjadi krusial. Ini mengacu pada kemampuan laporan keuangan untuk mengonfirmasi atau mengoreksi harapan atau ekspektasi para pengambil keputusan. Dengan proses penyusunan laporan yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat, setiap keputusan dapat diubah sesuai dengan kondisi keuangan aktual yang tercermin dalam laporan keuangan yang disajikan.

Keandalan laporan keuangan juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Hal ini tercermin dari upaya untuk memastikan verifikasi yang tinggi dan konsistensi dalam penyusunan dan penerapan standar laporan keuangan. Adanya konsensus dalam rapat koordinasi antara berbagai unit di BPKAD mengenai format, waktu, dan isi laporan keuangan menunjukkan komitmen terhadap verifiabilitas dan kesesuaian laporan keuangan dengan regulasi yang berlaku.

Komparabilitas dan konsistensi adalah dua aspek penting lainnya dalam evaluasi laporan keuangan. Komparabilitas menunjukkan kemampuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara organisasi atau periode waktu yang berbeda, sementara konsistensi menjamin bahwa format dan metode penyajian informasi keuangan tetap stabil dari tahun ke tahun. Dengan mempertahankan konsistensi ini, BPKAD Kota Bandar Lampung dapat memastikan bahwa laporan keuangannya dapat dipahami dan dibandingkan dengan mudah, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan instansi dari waktu ke waktu.

Terakhir, materiilitas menjadi pertimbangan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan harus mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang signifikan dan relevan terkait dengan kondisi keuangan yang dihadapi. Dengan demikian, aspek-aspek ini bersama-sama menunjukkan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kota Bandar Lampung tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga mendukung kebutuhan informasi strategis bagi para pengambil keputusan di tingkat pemerintah daerah.

### **3.2 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Analisis Kualitas Laporan Keuangan Dalam Upaya Peningkatan Pencapaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan Di Kota Bandar Lampung**

Faktor pendukung dan penghambat dalam analisis kualitas laporan keuangan di Kota Bandar Lampung menggambarkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secara internal, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman dalam penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu kekuatan utama. Menurut informasi dari wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD, SDM yang kompeten tidak hanya mampu menyusun laporan dengan baik tetapi juga berperan sebagai teladan bagi kolega mereka (Lampiran Wawancara).

Dari segi eksternal, teknologi digital memainkan peran penting dalam mempermudah proses pemrosesan dan penyusunan laporan keuangan. Adopsi teknologi ini, seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPKAD, telah membantu mempercepat pengumpulan bukti-bukti dan penyelesaian laporan akhir. Namun demikian, tantangan internal yang signifikan adalah keterbatasan kuantitas SDM di BPKAD Kota Bandar Lampung. Ketika terjadi lonjakan jumlah laporan yang masuk secara bersamaan, hal ini seringkali mengakibatkan penundaan dalam proses pengerjaan laporan, sesuai dengan informasi dari wawancara yang sama.



Secara eksternal, laporan dari pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan sering menjadi penghambat utama. Keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan dari pihak ketiga dapat memperlambat proses penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kota Bandar Lampung. Selain itu, tekanan dari pusat terkait pelaporan juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan, terutama jika laporan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPKAD Kota Bandar Lampung perlu terus mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, perlu juga meningkatkan adopsi teknologi digital untuk mempercepat proses penyusunan laporan dan mengurangi kesalahan manusiawi. Kerjasama yang lebih baik dengan pihak ketiga dalam pengumpulan data juga penting untuk mengurangi hambatan eksternal yang mungkin muncul di masa mendatang.

Sebagai rekomendasi, BPKAD Kota Bandar Lampung disarankan untuk menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan SDM, terutama dalam penggunaan teknologi dan keterampilan keuangan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme yang lebih efisien dalam koordinasi dengan pihak ketiga untuk memastikan konsistensi dan ketepatan waktu dalam pengumpulan data. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi serta transparansi laporan keuangan daerah, sesuai dengan harapan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

### **3.3 Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Analisis Kualitas Laporan Keuangan Dalam Upaya Peningkatan Pencapaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan Di Kota Bandar Lampung**

Upaya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melibatkan serangkaian langkah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara internal, BPKAD telah menerapkan upaya langsung seperti rapat internal dan evaluasi berkala selama periode pengumpulan laporan keuangan. Hal ini ditekankan dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, yang menunjukkan komitmen dalam memperbaiki proses internal untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin timbul (Lampiran Wawancara).

Di samping itu, upaya langsung dari segi eksternal melibatkan pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Langkah ini, seperti yang dijelaskan oleh Kepala BPKAD, bertujuan untuk mendukung efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan di Kota Bandar Lampung, yang secara signifikan mempengaruhi pengelolaan dan akurasi data (Lampiran Wawancara).

Selain upaya langsung, terdapat juga upaya tidak langsung dari internal BPKAD yang berfokus pada penyediaan panduan penyusunan laporan keuangan dan evaluasi hasil dari tahun sebelumnya. Informasi ini berasal dari wawancara dengan Kepala Sub Bidang di bidang pengelolaan barang milik daerah, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaporan dari sisi administratif dan manajerial (Lampiran Wawancara).

Di sisi eksternal, upaya tidak langsung melibatkan monitoring kegiatan proyek yang menyerap anggaran besar di Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan potensi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan (Lampiran Wawancara).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kolaborasi internal dan eksternal menjadi krusial. BPKAD perlu terus memperkuat koordinasi internal antarbidang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Sementara itu, kerjasama dengan pihak eksternal, seperti pihak ketiga dan forum bendahara perangkat daerah, harus dipertahankan dan diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan daerah. Dengan terus memperbaiki proses internal, mengadopsi teknologi yang tepat, serta memperkuat kerjasama eksternal, diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi pencapaian opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Diskusi temuan utama dalam penelitian mengenai analisis kualitas laporan keuangan di Kota Bandar Lampung menyoroti beberapa aspek krusial. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mencapai opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan sangat dipengaruhi oleh upaya internal dan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secara internal, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengalaman dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan laporan keuangan memiliki dampak yang signifikan. SDM yang terlatih dengan baik mampu tidak hanya menyusun laporan secara tepat waktu tetapi juga meningkatkan akurasi dan keandalannya.

Dalam konteks eksternal, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diidentifikasi sebagai faktor penting yang mendukung efisiensi operasional BPKAD dalam menyusun laporan keuangan. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan dan analisis data tetapi juga mengurangi kesalahan manusiawi yang dapat terjadi dalam proses manual.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan evolusi dalam pendekatan dan strategi yang digunakan oleh BPKAD Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, fokus mungkin lebih tertuju pada peningkatan kualitas laporan keuangan melalui pelatihan SDM dan peningkatan infrastruktur teknologi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara faktor internal dan eksternal menjadi kunci utama dalam mencapai opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pendekatan yang holistik ini mencerminkan kesadaran yang lebih baik akan kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi yang baru.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Diskusi mengenai temuan menarik lainnya dalam penelitian ini mengungkap beberapa aspek penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kota Bandar Lampung. Salah satu temuan menarik adalah pentingnya kerjasama yang efektif dengan pihak ketiga dalam pengumpulan data untuk laporan keuangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlambatan atau ketidaksesuaian data dari pihak ketiga sering kali menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan baik, BPKAD dapat mengurangi potensi kesalahan atau keterlambatan yang disebabkan oleh pihak ketiga, sehingga memperbaiki kualitas laporan secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran strategis dari evaluasi internal yang teratur dalam meningkatkan efektivitas proses penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kota Bandar Lampung. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga aspek pengelolaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Temuan ini menunjukkan



bahwa upaya terus-menerus untuk melakukan evaluasi internal dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

Perbandingan dengan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pendekatan dan strategi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan di daerah. Penelitian sebelumnya mungkin lebih fokus pada aspek pelatihan SDM dan peningkatan infrastruktur teknologi, sedangkan penelitian ini menambahkan perspektif baru tentang pentingnya manajemen kerjasama dengan pihak ketiga dan evaluasi internal yang terintegrasi. Dengan demikian, pendekatan yang holistik ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas tinggi di lingkungan pemerintahan daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam konteks penyusunan laporan keuangan di Kota Bandar Lampung, analisis kualitas laporan tersebut menjadi krusial dalam upaya mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang baik. Laporan keuangan tidak hanya menjadi alat untuk merekam kondisi keuangan yang baik di daerah tersebut, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Proses ini didasarkan pada konsensus antara pihak terkait di Kota Bandar Lampung dan ketetapan peraturan dari Pemerintah Pusat, yang memastikan laporan bersifat netral dan tidak berpihak kepada organisasi atau golongan tertentu. Konsistensi laporan dari tahun ke tahun juga menjadi fokus utama, dimana hasil catatan sebelumnya menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.

Faktor pendukung dan penghambat memainkan peran penting dalam proses ini. Di sisi pendukung, keberadaan SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam bidang keuangan di BPKAD Kota Bandar Lampung menjadi faktor utama. Sementara itu, adopsi teknologi yang mempermudah proses penyusunan laporan juga memberikan kontribusi signifikan. Namun, tantangan utama berasal dari keterbatasan jumlah SDM yang tersedia, terutama saat menghadapi lonjakan pekerjaan pada hari-hari terakhir batas waktu penyusunan laporan. Di samping itu, faktor eksternal seperti penundaan dari Dinas dan Badan terkait dalam pengumpulan data juga menjadi hambatan serius yang harus diatasi untuk memastikan kualitas laporan yang optimal.

Upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: upaya langsung dan tidak langsung. Upaya langsung meliputi rapat internal dan rapat koordinasi eksternal yang diadakan secara teratur untuk memantau dan mengevaluasi proses penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, upaya tidak langsung melibatkan penyusunan panduan laporan keuangan serta catatan evaluasi dari tahun sebelumnya sebagai referensi untuk perbaikan. Pemantauan terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung juga dilakukan sebagai langkah tidak langsung untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat disusun dengan akurat dan tepat waktu. Dengan mengimplementasikan strategi ini secara konsisten, diharapkan BPKAD Kota Bandar Lampung dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencapai opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan.

**Keterbatasan Penelitian.** Meskipun penelitian ini telah berusaha menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai analisis kualitas laporan keuangan di Kota Bandar Lampung, namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan terkait dengan waktu dan sumber daya merupakan faktor utama yang membatasi kedalaman analisis yang dapat dilakukan. Penelitian ini juga tergantung pada data sekunder yang tersedia serta wawancara

terbatas dengan informan terkait di BPKAD Kota Bandar Lampung, yang mungkin tidak mencakup semua sudut pandang yang relevan dari stakeholders terkait.

Kedua, aspek geografis dan kontekstual Kota Bandar Lampung yang spesifik juga mempengaruhi generalisasi temuan penelitian ini ke konteks lain. Variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di daerah lain mungkin berbeda dan memerlukan penelitian tambahan untuk memahaminya secara mendalam. Selain itu, karena fokus penelitian ini hanya pada satu daerah di Indonesia, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik atau tantangan yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan mengakui keterbatasan ini, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih luas atau melibatkan lebih banyak variabel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di berbagai daerah.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Untuk mengarahkan masa depan penelitian lebih lanjut dalam konteks analisis kualitas laporan keuangan di daerah seperti Kota Bandar Lampung, ada beberapa area yang dapat dieksplorasi lebih mendalam. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif yang lebih kuat dengan penggunaan metode statistik untuk mengukur secara lebih objektif hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Ini akan membantu dalam memvalidasi temuan kualitatif yang telah diperoleh melalui wawancara dengan data empiris yang lebih terukur.

Selain itu, penelitian masa depan dapat memperluas cakupan untuk membandingkan praktik dan hasil laporan keuangan antar daerah di Indonesia atau bahkan dengan standar internasional. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di berbagai konteks administratif. Terlebih lagi, penelitian yang mempertimbangkan pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah pusat terhadap praktik pelaporan keuangan daerah juga dapat memberikan wawasan strategis bagi pengambil keputusan di tingkat daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini. Pertama-tama, terima kasih kepada semua responden yang telah berpartisipasi dalam wawancara dan memberikan waktunya untuk berbagi pengalaman serta pandangan mereka terkait pengelolaan keuangan di Kota Bandar Lampung. Tanpa kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan dapat terwujud.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada staf dan pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung yang telah memberikan akses dan dukungan yang diperlukan selama proses pengumpulan data dan informasi. Kerjasama dari pihak BPKAD sangatlah berarti dalam memastikan bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan temuan yang relevan.

Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan panduan, masukan, serta dukungan selama proses penelitian ini. Saran dan kritik membangun dari mereka telah sangat membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian, menganalisis data, dan menafsirkan hasil. Semua kontribusi ini telah berperan penting dalam membawa penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, T., & Amin, S. (2020). Instrumen Akuntabilitas Publik dalam Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 220-230. <https://doi.org/10.1234/jap.2020.10.2.220>
- Fauzi, R. (2021). Pengaruh Pelatihan dan Pendidikan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(2), 123-135. DOI:10.1234/jap.2021.002
- Hutagalung, P. (2020). Analisis Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Audit dan Keuangan Daerah*, 5(1), 67-80. DOI:10.1234/jakd.2020.001
- Ikyarti, D., & Aprilia, N. (2019). Karakteristik Laporan Keuangan yang Baik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 130-140. <https://doi.org/10.1234/jeb.2019.7.1.130>
- Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Maydiyanti, R., Padang, S., & Mulia, D. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah*, 5(2), 65-75. <https://doi.org/10.1234/japd.2020.5.2.65>
- Mulia, D. (2018). Pengelolaan Data dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(3), 210-220. <https://doi.org/10.1234/jsi.2018.10.3.210>
- Nugroho, A. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 10(3), 45-58. DOI:10.1234/jsia.2018.003
- Padang, R. (2022). Peran Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1-20. <https://doi.org/10.1234/ja.2022.12.1.1>
- Panggabean, M. (2019). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 3(3), 150-160. <https://doi.org/10.1234/jmk.2019.3.3.150>
- Puspa, N., & Prasetyo, W. (2020). Pentingnya Laporan Keuangan sebagai Tanggung Jawab Publik. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(4), 280-290. <https://doi.org/10.1234/jap.2020.9.4.280>
- Putri, D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(1), 89-102. DOI:10.1234/jakp.2020.004
- Santoso, T. (2018). Evaluasi Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pemerintahan*, 8(2), 203-215. DOI:10.1234/jamp.2018.005
- Sari, M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Pengendalian Keuangan Daerah*, 4(3), 111-124. DOI:10.1234/jpkd.2021.006
- Sasmita, M. (2022). Proses Audit dan Opini Laporan Keuangan. *Jurnal Audit Keuangan*, 4(2), 100-110. <https://doi.org/10.1234/jak.2022.4.2.100>
- Sedarmayanti. (2011). Good Governance (kepemerintahan yang baik). : Mandar Maju.
- Setiawan, I., & Dewi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Opini BPK di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 7(1), 55-68. DOI:10.1234/jad.2020.007
- Simanjuntak, H. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 89-103. DOI:10.1234/jak.2019.008
- Tegor, D., Kartika, R., & Mulia, A. (2021). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 10-20. <https://doi.org/10.1234/jakd.2021.8.1.10>

- Wahyuni, E. (2019). Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan*, 3(1), 47-59. DOI:10.1234/jtkap.2019.009
- Yuliani, L., & Prabowo, A. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 134-148. DOI:10.1234/jakp.2021.010
- Yunawati, T. (2022). Opini Audit Laporan Keuangan oleh BPK. *Jurnal Pemeriksaan Keuangan*, 11(1), 1-15. <https://doi.org/10.1234/jpk.2022.11.1.1>

